

**PERAN DINAS KOPERASI DAN USAHA MIKRO KECIL MENENGAH (UMKM)
DALAM MENINGKATKAN PEREKONOMIAN MASYARAKAT
DI KOTA MEDAN PROVINSI SUMATERA UTARA**

Josua Sinambela

NPP. 30.0109

*Asdaf Kabupaten Deli Serdang, Provinsi Sumatera Utara
Program Studi Administrasi Pemerintahan Daerah*

Email: sinambela21josua@gmail.com

ABSTRACT

Problem Statement/Background (GAP): *The number of MSMEs under the guidance of the Cooperatives and MSMEs Office is only 1,717, this number is quite small because according to data from the Medan City Statistical Agency there are approximately 70,000 total MSMEs in Medan City. It's really a shame because only 1,717 MSMEs received direct guidance and coaching from the Office of Cooperatives and MSMEs in Medan City. So it could be that only around 1,717 MSMEs in Medan City who have above average quality can compete in the market because they have received guidance and direction from the Office of Cooperatives and MSMEs in Medan City.* **Purpose:** *The purpose of this research is to find out and analyze the role of the Office of Cooperatives and UMKM in Improving the Community's Economy in Medan City, North Sumatra Province.* **Method:** *This study uses a descriptive method with an inductive approach. There are several ways of collecting data used by researchers in this study, namely observation, interviews, and documentation. The data analysis technique used is data reduction, data presentation and conclusion drawing.* **Result:** *The results of this study are the Role of the Office of Cooperatives and SMEs in Improving the Community's Economy in Medan City, which can be seen from the results of interviews and data obtained in the field. The policy of the Office of Cooperatives and SMEs in improving the economy of the community in Medan City with the strategies and programs owned by the Office of Cooperatives and SMEs in Medan City as well as the results of various collaborations in various sectors that can support programs and strategies for the role of the Office of Cooperatives and SMEs in improving the economy of the community in the City Medan.* **Conclusion:** *The Medan City Office of Cooperatives and SMEs needs to improve access to finance to be able to help business owners access financing through low interest loan programs or other financial assistance. Increasing financing and empowering Cooperatives and MSMEs through cooperation between each sector in order to increase the productivity of business actors. Then the Medan City Office of Cooperatives and SMEs is expected to be able to determine the right policy direction to support the growth and development of Cooperatives and SMEs. as well as evaluation results of previous programs.*

Keywords: *Office of Cooperatives and SMEs, Improving Society, Policy*

ABSTRAK

Permasalahan/Latar Belakang (GAP): Jumlah UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM hanya berjumlah 1.717, jumlah tersebut terbilang cukup sedikit karena menurut data dari Badan Statistik Kota Medan kurang lebih ada 70.000 total UMKM yang ada di Kota Medan. Sungguh sangat di sayangkan karena hanya 1.717 UMKM yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Kota Medan. Sehingga bisa jadi hanya sekitar 1.717 UMKM di Kota Medan yang memiliki kualitas di atas rata rata yang dapat bersaing di pasar karena mereka sudah mendapat bimbingan dan arahan dari Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Medan. **Tujuan:** Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan. **Hasil/Temuan:** Hasil penelitian ini adalah Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan dapat dilihat dari hasil wawancara dan data yang didapat dilapangan. Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan dengan strategi dan program-program yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan serta hasil dari berbagai kerjasama berbagai sektor yang dapat mendukung program dan strategi peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan. **Kesimpulan:** Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan perlu meningkatkan akses pembiayaan untuk dapat membantu pemilik usaha untuk mengakses pembiayaan melalui program pinjaman dengan bunga rendah atau bantuan keuangan lainnya. Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui kerja sama antar setiap sektor guna meningkatkan produktifitas pelaku usaha. Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan diharapkan mampu menentukan arah kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM. serta hasil evaluasi terhadap program sebelumnya.

Kata kunci: Dinas Koperasi dan UMKM, Meningkatkan Masyarakat, Kebijakan

I. PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Didalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) didefinisikan pengertian UMKM dan kriterianya, yaitu usaha produktif milik perorangan atau badan usaha perorangan yang memenuhi kriteria usaha mikro sebagaimana diatur dalam undang-undang, Usaha Mikro kecil adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri, yang dilakukan oleh perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha besar.

UMKM juga mempunyai ciri khas yaitu modal yang kecil, resiko yang sedikit tinggi tetapi penerimaan juga tinggi dan membawa kewirausahaan bagi pemiliknya (Wahyuningsih, 2009). Begitu juga UMKM yang telah berkontribusi pada pendapatan daerah Provinsi Sumatera Utara Kota Medan. Kota Medan juga

memiliki peranan penting dalam pertumbuhan ekonomi di Sumatera Utara, dengan semakin meningkatnya perekonomian di Sumatera Utara yang di pengaruhi oleh bisnis kecil maupun menengah.

Dengan adanya UMKM membuat pertumbuhan dan perkembangan dalam kesempatan mendapat kerja dan pendapatan naik. Adanya penyerapan tenaga kerja dengan jumlah banyak membantu usaha pemerintah dalam mengatasi kemiskinan dan pengangguran yang menjadikan UMKM mempunyai peran yang vital. Peran yang dimiliki UMKM pada pembangunan perekonomian sangat penting, dikarenakan berperan pada kemajuan ekonomi serta dapat menyerap tenaga kerja, peran yang dimiliki oleh UMKM yaitu pemerataan dalam pembangunan.

Pada saat terjadi krisis ekonomi besar-besaran di Indonesia pada tahun 1998 lalu, usaha besar sampai terhenti kegiatannya. Kenyataannya usaha kecil cukup efektif dan dapat bertahan dari krisis ekonomi tersebut. Melihat kejadian Indonesia pada masa krisis, tidak berlebihan untuk fokus pada 2 pengembangan UMKM swasta, dan sektor usaha ini sering diabaikan karena outputnya kecil dan tidak mampu bersaing dengan bisnis lain. Karakteristik umum UMKM adalah usaha yang mandiri, wilayah pemasaran yang terlokalisir, aset perusahaan kecil, dan jumlah pegawai yang terbatas.

1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)

Jumlah UMKM yang menjadi binaan Dinas Koperasi dan UMKM hanya berjumlah 1.717, jumlah tersebut terbilang cukup sedikit karena menurut data dari Badan Statistik Kota Medan kurang lebih ada 70.000 total UMKM yang ada di Kota Medan. Sungguh sangat di sayangkan karena hanya 1.717 UMKM yang mendapatkan bimbingan dan pembinaan langsung dari Dinas Koperasi dan UMKM yang ada di Kota Medan.

Sehingga bisa jadi hanya sekitar 1.717 UMKM di Kota Medan yang memiliki kualitas di atas rata rata yang dapat bersaing di pasar karena mereka sudah mendapat bimbingan dan arahan dari Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Medan. Berikut adalah data jumlah UMKM yang ada di Kota Medan dari tahun 2018 sampai 2021.

Tabel Jumlah UMKM Kota Medan Tahun 2018-2021

NO. (1)	Tahun (2)	Jumlah (3)
1.	2018	773
2.	2019	1.206
3.	2020	16.620
4.	2021	27.763
5.	2022	70.000

Sumber data: Badan Pusat Statistik Kota Medan Tahun 2021

Tabel di atas dapat kita lihat bahwasanya jumlah UMKM di Kota Medan dari tahun ke tahun terus mengalami peningkatan terkhususnya pada tahun 2020-2022, hal itu disebabkan oleh adanya pandemi covid-19 yang menyebabkan banyak masyarakat di PHK sehingga mereka membuka usaha sendiri untuk terus bertahan hidup di era pandemi tersebut.

Dengan banyaknya jumlah UMKM di Kota Medan sekarang ini menyebabkan sektor ini menjadi faktor penting dalam perekonomian yang ada di Kota Medan. Selain jumlah UMKM yang banyak pemerintah juga harus memperhatikan kualitas UMKM tersebut sehingga tidak kalah saing dengan franchise Nasional

yang ada di Kota Medan, karena percuma saja jumlah UMKM banyak tetapi tidak memiliki kualitas yang bagus dan akan menjadi masalah sosial bagi masyarakat itu sendiri.

Menurut hasil penelitian Sedyastuti (2018) keberadaan UMKM tidak dapat diragukan karena terbukti mampu bertahan dan menjadi penggerak ekonomi, terutama setelah krisis ekonomi. Di sisi lain, UMKM juga menghadapi banyak masalah, di Kota Medan sendiri masih banyak permasalahan yang dialami pelaku UMKM sehingga menyebabkan masih sedikitnya jumlah UMKM yang memiliki kualitas yang baik. Berikut adalah beberapa permasalahan yang dihadapi pelaku UMKM di kota medan:

1. Belum memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan (SIUP).
2. Modal usaha yang minim.
3. Tidak memiliki pengetahuan yang luas mengenai bisnis.
4. Kurang memanfaatkan pemasaran digital untuk meningkatkan penjualan.
5. Belum tahu mengembangkan bisnis.
6. Tidak melakukan branding.
7. Komunikasi bisnis yang kurang efektif.
8. Kurangnya inovasi produk.

Sumber: <https://www.staffany.id/blog/permasalahan-umkm/>

1.3. Penelitian Terdahulu

Peneliti mengambil 3 penelitian sebelumnya yang terkait dengan penelitian yang akan dilakukan.

Penelitian pertama dilakukan oleh Dwi Sepriyono Nur (2017) dalam jurnal yang berjudul “Peran Dinas Koperasi dan UKM Dalam Pemberdayaan Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) di Kota Samarinda”. Hasil yang diperoleh dari penelitian ini menunjukkan bahwa pertumbuhan iklim usaha yang dilakukan Dinas Koperasi dan UMKM dalam rangka menumbuhkan jumlah UMKM di Kota Samarinda dengan memberikan kemudahan perijinan serta dukungan serta regulasi yang kuat agar UMKM dapat berdaya saing dan mampu tumbuh berkembang, pertumbuhan unit-unit usaha baru yang dilakukan oleh Dinas Koperasi dan UMKM yaitu melakukan kegiatan temu UMKM dalam upaya peningkatan jumlah pelaku UMKM di Kota Samarinda.

Penelitian kedua dilakukan oleh Ulfa Anastasia Maureen Purba (2013) dalam skripsi yang berjudul “Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai Dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah”. Hasil penelitian ini adalah menunjukkan peranan Dinas Sosial tenaga kerja dan Koperasi sudah dapat dikatakan baik dilihat dari setiap kinerja mereka dalam memberikan pembinaan, baik di tingkat Kabupaten dan Provinsi, walaupun tidak sedikit juga pedagang yang tidak mau ikut berpartisipasi pada pembinaan tersebut mengingat beberapa pedagang UMKM dodol bengkel tidak terdaftar karena tidak memiliki izin usaha sehingga mereka tidak ikut serta karena takut dikenakan sanksi dari perbuatan mereka.

Penelitian ketiga dibuat Samantha Immanuel Panjaitan (2018) dengan skripsi mempunyai judul “Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan Usaha Mikro Kecil Menengah Kota Medan”. Adapun yang dapat disimpulkan adalah pemberian pemberdayaan berbentuk bantuan pemberdayaan permodalan terhadap pelaku UMKM oleh Dinas Koperasi dan UMKM di kota Medan. Meningkatkan total hasil produksi UMKM dan menaikkan keuntungan diperoleh oleh pelaku UMKM di kota Medan.

1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah

Berdasarkan penelitian terdahulu di atas, terdapat perbedaan dalam penelitian ini yaitu penelitian ini berjudul “Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara” dan menggunakan teori peran menurut Soejono Soekanto (2012), serta dengan metode penelitian kualitatif deskriptif induktif. Persamaan dari ketiga penelitian di atas yaitu sama-sama menggunakan metode penelitian yang sama yaitu menggunakan metode kualitatif deskriptif. Penelitian ini juga berbeda dengan penelitian di atas, karena mengambil lokus penelitian di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

1.5. Tujuan.

Tujuan dilaksanakannya penelitian ini yaitu untuk mengetahui dan menganalisis Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara.

II. METODE

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan induktif. Terdapat beberapa cara pengumpulan data yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini, yaitu observasi, wawancara, serta dokumentasi. Teknik analisis data yang digunakan adalah Reduksi Data, Penyajian Data dan Penarikan Kesimpulan.

III. HASIL DAN PEMBAHASAN

3.1 Peran Dinas Koperasi dan Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara

Penelitian Peran dari Dinas Koperasi dan UMKM dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan dilakukan berdasarkan teori peran menurut Soejono Soekanto (2012), dimana teori peran yang memiliki 3 dimensi aspek yaitu:

3.1.1 Fungsional

3.1.1.1. Tanggung Jawab

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M. Si selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang menyatakan:

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan dengan meningkatkan pengawasan terhadap koperasi dan UMKM agar dapat beroperasi secara legal dan terhindar dari masalah hukum serta menjalin kerjasama dengan lembaga keuangan, baik pemerintah maupun swasta, dalam rangka menyediakan modal usaha yang mudah diakses bagi pelaku usaha koperasi dan UMKM.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilakukan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di bertempat di satu ruangan bersama informan lainnya menyatakan:

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan memiliki tanggung jawab dalam membangun strategi dan rencana kerja yang tepat untuk meningkatkan kinerja dan pelayanan Dinas Koperasi dan UMKM dalam mendukung pertumbuhan dan pengembangan UMKM.

3.1.1.2 Efisiensi

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar, AP, M. Si selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilaksanakan pada hari kamis, 13 januari 2023 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang menyatakan:

Untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan Dinas koperasi dan UMKM bekerja sama dengan instansi terkait seperti pemerintah daerah, lembaga keuangan, dan lembaga swadaya masyarakat untuk menciptakan sinergi dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan serta Dinas koperasi dan UMKM meningkatkan kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) dengan memberikan pelatihan dan pengembangan untuk meningkatkan kompetensi dan profesionalisme dalam menjalankan tugas dan fungsinya.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilakukan pada hari kamis, 13 januari 2023 bertempat di satu ruangan bersama informan lainnya menyatakan:

Dinas koperasi dan UMKM melakukan pengawasan dan monitoring terhadap pelaksanaan program dan kegiatan untuk memastikan bahwa program berjalan dengan baik dan mencapai tujuannya dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan, dan juga memanfaatkan teknologi informasi untuk meningkatkan efisiensi dalam pengelolaan data dan informasi, serta memudahkan komunikasi dan koordinasi antara anggota dinas koperasi dan UMKM. Dengan melakukan hal tersebut Dinas Koperasi dan UMKM dapat meningkatkan efisiensi dalam menjalankan tugas dan fungsinya, sehingga dapat memberikan dampak positif dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kota Medan.

3.1.1.3 Efektivitas

27 Rencana Strategis 2021-2026 Dinas Koperasi Usaha Kecil dan Menengah Kota Medan

Program/Kegiatan	Anggaran Pada tahun 2016-2020					Realisasi Anggaran pada Tahun 2016-2020					Rasio Capaian				
	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020	2016	2017	2018	2019	2020
Program Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Aparatur	170,000,000	270,000,000	234,946,150	186,600,000	62,945,250	114,374,400	233,910,330	169,202,100	92,600,000	61,185,000	67.28	86.63	72.02	49.62	97.20
Program Peningkatan Pengembangan Sistem Pelaporan Capaian Kinerja dan Keuangan	10,000,000	70,000,000				9,719,200	22,715,000				97.19	32.45			
Program Penciptaan Iklim Usaha Kecil Menengah yang Kondusif	900,000,000	500,000,000	472,573,689	363,020,000		578,727,400	460,624,500	415,511,600	198,000,000		64.30	92.12	87.93	54.54	
Program Pengembangan Kewirausahaan dan Keunggulan Kompetitif Usaha Kecil Menengah	2,628,281,500	1,535,000,000	4,695,508,986	5,355,348,234	909,896,268	1,814,865,080	1,416,903,311	4,388,690,326	4,932,866,700	897,612,000	69.05	92.31	93.47	92.11	98.65

Gambar Rencana Strategis Tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan

Sumber: Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan 2021-2026

Pada gambar di atas dapat diketahui bersama program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah pada rencana strategis dari tahun 2021-2026 Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan, rasio pencapaiannya mengalami kenaikan signifikan dari tahun 2016 ke 2020. Walaupun terjadi fluktuasi pada rasio pencapaiannya di tahun 2017 – 2019, di tahun 2020 rasio pencapaiannya naik drastis sehingga dari data rencana strategis di atas dapat dikatakan Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan melalui program pengembangan kewirausahaan dan keunggulan kompetitif Usaha Kecil Menengah dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan dapat dikatakan efektif melalui data di atas dari 4 tahun kebelakang 2020.

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilaksanakan pada hari kamis, 13 januari 2023 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang menyatakan:

Dinas Koperasi dan UMKM melakukan pengukuran dan evaluasi melalui berbagai indikator yang telah ditetapkan sebelumnya, seperti target pencapaian, anggaran yang digunakan, tingkat partisipasi masyarakat, dan indikator lainnya yang relevan. Dengan melakukan evaluasi secara berkala dan berkesinambungan, maka diharapkan dapat terus meningkatkan efektivitas peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di kota Medan.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilakukan pada hari kamis, 13 januari 2023 bertempat di satu ruangan bersama informan lainnya menyatakan:

Dinas Koperasi dan UMKM mempunyai peran penting dalam meningkatkan perekonomian masyarakat melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM. Namun, upaya ini harus didukung oleh berbagai pihak, termasuk pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta, untuk mencapai hasil yang optimal.

3.1.2 Normatif

3.1.2.1 Etika

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar, selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilaksanakan pada hari kamis, 13 januari 2023 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang menyatakan:

Dalam menjalankan tugas, Dinas Koperasi dan UMKM bersikap terbuka dan transparan dengan pihak-pihak terkait, termasuk masyarakat, pelaku usaha, dan pihak-pihak lain yang terlibat dalam perekonomian kota Medan. Sebagai pihak yang bertanggung jawab untuk meningkatkan perekonomian masyarakat kota Medan. Dinas Koperasi dan UMKM memiliki kesadaran untuk menjalankan tugas dengan sepenuh hati dan memberikan yang terbaik bagi masyarakat.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilakukan pada hari kamis, 13 januari 2023 bertempat di satu ruangan bersama informan lainnya menyatakan:

Dinas Koperasi dan UMKM bekerja dengan penuh tanggung jawab dan memahami tugas dan tanggung jawabnya dengan baik. Menjaga citra dan reputasi Dinas Koperasi dan UMKM dengan tidak melakukan tindakan yang merugikan masyarakat atau perusahaan. Memiliki sikap empati dan peduli terhadap kepentingan masyarakat, serta memastikan bahwa program-program yang dilaksanakan oleh Dinas Koperasi dan UMKM memberikan manfaat yang nyata bagi masyarakat Kota Medan.

3.1.2.2 Hukum

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar, selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang menyatakan:

Dalam melaksanakan tugas untuk meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan, Dinas Koperasi dan UMKM harus mematuhi hukum dan peraturan yang berlaku, seperti UU No. 20 Tahun 2008 tentang Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah dan UU No. 25 Tahun 1992 tentang Perkoperasian.

Selain itu, hukum juga mengatur tentang perlindungan konsumen dan hak-hak pekerja, sehingga Dinas Koperasi dan UMKM harus memastikan bahwa koperasi dan UMKM yang didukungnya mematuhi aturan tersebut. Hal ini akan membantu meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap koperasi dan UMKM sehingga dapat meningkatkan perekonomian masyarakat secara keseluruhan.

3.1.3 Simbolik

3.1.3.1 Identitas

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar, selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang menyatakan:

Dinas Koperasi dan UMKM di Kota Medan mendorong pertumbuhan Koperasi dan UMKM dengan memberikan bimbingan dan pengawasan terhadap kegiatan usaha koperasi dan UMKM. Hal ini dilakukan agar koperasi dan UMKM dapat berkembang dan memberikan kontribusi yang signifikan dalam perekonomian masyarakat Kota Medan. Dinas Koperasi dan UMKM juga mengawasi dan memastikan bahwa produk yang dihasilkan oleh koperasi dan UMKM memenuhi standar kualitas yang baik dan memuaskan konsumen. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga memberikan bantuan dan dukungan agar Koperasi dan UMKM mampu memberikan pelayanan yang baik kepada konsumen, Dinas Koperasi dan UMKM membangun jaringan dan kerjasama dengan berbagai pihak, baik itu dengan instansi pemerintah, swasta, maupun lembaga lainnya. Hal ini dilakukan untuk memperluas pasar dan meningkatkan daya saing produk koperasi dan UMKM di Kota Medan.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilakukan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di satu ruangan bersama informan lainnya menyatakan:

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Medan Dinas Koperasi dan UMKM berperan sebagai fasilitator, pengawas, dan pelindung UMKM di Kota Medan. Dalam hal ini, Dinas Koperasi dan UMKM memiliki tanggung jawab untuk memberikan bantuan teknis, pelatihan, dan pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produk mereka. Selain itu, Dinas Koperasi dan UMKM juga bertanggung jawab untuk mengawasi dan memberikan perlindungan bagi UMKM dari praktik bisnis yang tidak sehat dan melindungi hak-hak konsumen. Identitas ini menjadi penting dalam memperkuat posisi UMKM di pasar dan meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Medan secara keseluruhan.

3.1.3.2 Simbolisme

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar, selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang menyatakan:

Dinas Koperasi dan UMKM dapat membangun citra positif, mempromosikan produk dan jasa, dan membangun kesadaran merek yang kuat. Semua ini dapat membantu meningkatkan perekonomian masyarakat kota Medan melalui pengembangan dan pemberdayaan UMKM.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilakukan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di satu ruangan bersama informan lainnya menyatakan:

Simbolisme dari Dinas Koperasi dan UMKM dapat memberikan makna pentingnya kerjasama, inovasi, serta peran dinas dalam meningkatkan perekonomian masyarakat kota Medan melalui dukungan dan bantuan yang diberikan.

3.1.3.3 Status

Pernyataan pertama disampaikan oleh Bapak Hendra Ridho Gunawan Siregar, selaku sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilaksanakan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di ruangan Sekretaris Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang menyatakan:

Memberikan dukungan dan sumber daya yang cukup bagi dinas koperasi dan UMKM untuk dapat berfungsi secara optimal. Hal ini meliputi memberikan anggaran yang cukup, tenaga ahli yang terampil, dan peralatan dan fasilitas yang memadai untuk memfasilitasi kegiatan koperasi dan UMKM. Berperan aktif dalam memastikan bahwa status ini diakui oleh masyarakat dan didukung oleh sumber daya yang memadai.

Pernyataan berikutnya disampaikan oleh Kasubbag Umum Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan yang dilakukan pada hari Kamis, 13 Januari 2023 bertempat di satu ruangan bersama informan lainnya menyatakan:

Dalam meningkatkan perekonomian masyarakat Kota Medan, Dinas Koperasi dan UMKM sebagai penyelenggara layanan publik di bidang Koperasi dan UMKM. Dinas Koperasi dan UMKM bertanggung jawab untuk memberikan pelayanan yang terbaik kepada pelaku usaha Koperasi dan UMKM di Kota Medan, termasuk membantu dalam proses pendirian usaha, memberikan pelatihan dan bimbingan, serta memfasilitasi akses ke pasar dan sumber pembiayaan dan juga menjadi mediator antara pelaku usaha dengan pemerintah dan masyarakat, serta memperjuangkan kepentingan dan hak-hak pelaku usaha koperasi dan UMKM di tingkat lokal, regional, dan Nasional.

3.2 Faktor-Faktor Pendukung dan penghambat Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan

3.2.1 Faktor Pendukung

3.2.1.1 Faktor Pendukung Internal

Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung internal yang dapat memperkuat peran dinas koperasi dan UMKM di Kota Medan:

1. Sumber Daya Manusia yang Kompeten: Dinas koperasi dan UMKM perlu memiliki tim yang terdiri dari staf yang kompeten dan berpengalaman di bidang koperasi dan UMKM. Staf yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pemahaman yang baik tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM akan mampu memberikan layanan yang efektif dan mendukung perkembangan sektor tersebut.
2. Infrastruktur dan Fasilitas: Dinas koperasi dan UMKM perlu memiliki infrastruktur dan fasilitas yang memadai untuk mendukung kegiatan operasionalnya. Ini meliputi kantor yang representatif,

aksesibilitas yang baik, teknologi informasi yang memadai, dan sumber daya lainnya yang diperlukan untuk menyelenggarakan program dan layanan yang efisien.

3.2.1.2 Faktor Pendukung Eksternal

Berikut ini adalah beberapa faktor pendukung eksternal yang dapat memperkuat peran dinas koperasi dan UMKM di Kota Medan:

1. **Kebijakan Pemerintah:** Kebijakan pemerintah yang mendukung pengembangan koperasi dan UMKM dapat menjadi faktor penting dalam memperkuat peran dinas. Kebijakan yang meliputi perlindungan, insentif fiskal, pembiayaan, dan kemudahan berusaha dapat menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan dan pengembangan koperasi dan UMKM.
2. **Kerjasama dengan Lembaga Keuangan:** Kerjasama dengan lembaga keuangan seperti bank, koperasi simpan pinjam, dan lembaga pembiayaan lainnya dapat memberikan akses pendanaan yang lebih mudah bagi koperasi dan UMKM. Dinas koperasi dan UMKM dapat menjalin kemitraan dengan lembaga keuangan untuk memberikan akses pembiayaan yang terjangkau dan program pembiayaan khusus bagi koperasi dan UMKM.

3.2.2 Faktor Penghambat

3.2.2.1 Faktor Penghambat Internal

Berikut ini adalah beberapa faktor penghambat internal yang dapat menghambat peran dinas koperasi dan UMKM di Kota Medan:

1. **Kurangnya Sumber Daya Manusia yang Kompeten:** Kurangnya staf yang memiliki pengetahuan, keterampilan, dan pengalaman yang memadai dalam bidang koperasi dan UMKM dapat menghambat peran dinas. Ketidaktahuan atau kurangnya pemahaman terhadap kebutuhan dan dinamika sektor koperasi dan UMKM dapat membatasi kemampuan dinas dalam memberikan layanan yang efektif dan mendukung pengusaha koperasi dan UMKM.
2. **Keterbatasan Infrastruktur dan Fasilitas:** Keterbatasan infrastruktur dan fasilitas seperti kantor yang tidak memadai, aksesibilitas yang buruk, dan kurangnya teknologi informasi yang memadai dapat menghambat kinerja dinas. Infrastruktur dan fasilitas yang terbatas dapat menghambat pelaksanaan program dan layanan yang efisien, serta mengurangi kemampuan dinas dalam menyediakan dukungan yang memadai bagi koperasi dan UMKM.

3.2.2.2 Faktor Penghambat Eksternal

Berikut ini adalah beberapa faktor penghambat eksternal yang dapat menghambat peran dinas koperasi dan UMKM di Kota Medan:

1. **Regulasi dan Kebijakan yang Tidak Mendukung:** Regulasi dan kebijakan pemerintah yang kompleks, tidak jelas, atau tidak memadai dapat menghambat peran dinas koperasi dan UMKM. Ketika aturan dan kebijakan tidak mendukung perkembangan dan pertumbuhan koperasi dan UMKM, dinas akan menghadapi kendala dalam melaksanakan program dan kegiatan yang mendukung sektor tersebut.
2. **Akses Terbatas ke Sumber Daya Finansial:** Keterbatasan akses terhadap sumber daya finansial, seperti pinjaman yang sulit diperoleh atau bunga yang tinggi, dapat menghambat peran dinas dalam menyediakan dukungan keuangan bagi koperasi dan UMKM. Kurangnya modal atau kredit yang terjangkau dapat membatasi pertumbuhan usaha dan inovasi di sektor koperasi dan UMKM. Kurangnya Pemahaman dan Kesadaran Masyarakat.

3.3 Upaya-Upaya Mengatasi Faktor-Faktor Penghambat Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan

3.3.1 Upaya Mengatasi Faktor Penghambat

3.3.1.1 Upaya Langsung Internal

Berikut ini adalah beberapa contoh upaya langsung internal yang dapat dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM di Kota Medan untuk mengatasi faktor penghambat peran mereka:

1. Peningkatan Pengetahuan dan Keterampilan: Dinas koperasi dan UMKM dapat meningkatkan pengetahuan dan keterampilan staf internal dalam mendukung koperasi dan UMKM. Hal ini dapat dilakukan melalui pelatihan, workshop, atau program pengembangan lainnya yang bertujuan untuk meningkatkan pemahaman tentang kebutuhan dan tantangan yang dihadapi oleh koperasi dan UMKM.
2. Pembentukan Tim Kerja yang Efektif: Dinas koperasi dan UMKM perlu memastikan adanya tim kerja yang efektif dan terkoordinasi dengan baik. Ini melibatkan pembagian tugas yang jelas, komunikasi yang baik, kolaborasi, dan pemantauan kinerja secara teratur. Dengan memiliki tim kerja yang solid, dinas dapat lebih efektif dalam menjalankan peran dan tugas mereka.

3.3.1.2 Upaya Langsung Eksternal

Berikut ini adalah beberapa contoh upaya langsung eksternal yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat peran dinas koperasi dan UMKM di Kota Medan:

1. Kerjasama dengan Pihak Eksternal: Dinas koperasi dan UMKM dapat menjalin kerjasama dengan pihak eksternal seperti lembaga keuangan, perguruan tinggi, lembaga pelatihan, dan organisasi masyarakat. Melalui kerjasama ini, dinas dapat memanfaatkan sumber daya dan pengetahuan yang ada untuk mendukung pengembangan koperasi dan UMKM di Kota Medan.
2. Program Pendampingan dan Konsultasi: Dinas koperasi dan UMKM dapat menyelenggarakan program pendampingan dan konsultasi bagi koperasi dan UMKM. Program ini dapat memberikan bimbingan teknis, konsultasi bisnis, dan pendampingan dalam pengembangan usaha. Dinas dapat melibatkan ahli dan praktisi di bidang koperasi dan UMKM untuk memberikan bantuan dan saran kepada para pelaku usaha.

3.3.1.3 Upaya Tidak Langsung Internal

Berikut adalah beberapa contoh upaya tidak langsung internal yang dapat dilakukan oleh dinas koperasi dan UMKM di Kota Medan untuk mengatasi faktor penghambat peran mereka:

1. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia: Dinas koperasi dan UMKM dapat memberikan pelatihan dan pengembangan keterampilan kepada staf internal mereka. Ini termasuk pelatihan dalam manajemen, keuangan, pemasaran, teknologi, dan keterampilan lainnya yang diperlukan untuk mengoptimalkan peran mereka dalam mendukung koperasi dan UMKM di Kota Medan.
2. Peningkatan Komunikasi dan Koordinasi Internal: Penting bagi dinas koperasi dan UMKM untuk memastikan adanya komunikasi dan koordinasi yang efektif antara anggota tim internal. Hal ini dapat dilakukan melalui rapat rutin, pertukaran informasi, dan pemberian arahan yang jelas untuk memastikan semua anggota tim memiliki pemahaman yang sama tentang peran dan tanggung jawab mereka.

3.3.1.4 Upaya Tidak Langsung Eksternal

Berikut, adalah beberapa contoh upaya tidak langsung eksternal yang dapat dilakukan untuk mengatasi faktor penghambat peran dinas koperasi dan UMKM di Kota Medan:

1. Kebijakan dan Regulasi yang Mendukung: Pemerintah Kota Medan dapat mengeluarkan kebijakan dan regulasi yang mendukung pertumbuhan dan pengembangan koperasi dan UMKM. Hal ini dapat

meliputi penyederhanaan prosedur perizinan, pembebasan pajak, bantuan pendanaan, dan kemudahan akses terhadap pasar.

2. Pelatihan dan Pendidikan: Dinas koperasi dan UMKM dapat mengadakan pelatihan dan program pendidikan untuk anggota koperasi dan pelaku UMKM. Ini termasuk pelatihan dalam manajemen usaha, keuangan, pemasaran, teknologi, dan keterampilan lainnya yang dibutuhkan untuk mengembangkan bisnis.

3.4 Diskusi Temuan Utama Penelitian

Sesuai dengan hasil analisis terhadap masalah yang terjadi di lapangan dengan menggunakan metode wawancara, observasi dan dokumentasi penelitian mengenai peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan. Peneliti menggunakan teori Soejono Soekanto (2012) sebagai pedoman dalam melakukan penelitian sehingga dalam penelitian ini, peneliti menarik kesimpulan dengan menggunakan sub tema dan sub-sub tema pada teori Soejono Soekanto sebagai berikut:

3.4.1 Fungsional

3.4.1.1 Tanggung Jawab

Tanggung jawab Dinas Koperasi Kota Medan mencakup mendorong perkembangan koperasi, pemenuhan kebutuhan anggota koperasi, pengawasan dan pemantauan, perlindungan terhadap anggota, serta mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan koperasi.

3.4.1.2 Efisiensi

Efisiensi dinas koperasi Kota Medan dalam teori peran Soejono Soekanto adalah bahwa dinas tersebut harus berusaha untuk mengelola sumber daya dengan efisien, memberikan pelayanan yang efisien kepada anggota koperasi dan masyarakat, menjalankan pengawasan yang efisien, dan mendorong partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan koperasi dengan cara yang efisien.

3.4.1.3 Efektivitas

Efektivitas dinas koperasi Kota Medan dalam teori peran Soejono Soekanto terkait dengan kemampuan mereka untuk mencapai tujuan koperasi, memenuhi kebutuhan anggota, meningkatkan partisipasi masyarakat, menjamin keadilan dan perlindungan anggota, serta membangun kemitraan yang kuat.

3.4.2 Normatif

3.4.2.1 Etika

Etika dinas koperasi Kota Medan dalam teori peran Soejono Soekanto mencakup integritas tinggi, tanggung jawab yang kuat, tindakan yang adil, pelayanan publik yang berkualitas, serta keterbukaan dan transparansi dalam komunikasi. Prinsip-prinsip ini penting untuk menjaga integritas, kepercayaan, dan keberlanjutan koperasi.

3.4.2.2 Hukum

Dinas Koperasi memiliki tanggung jawab untuk mematuhi dan melaksanakan hukum yang berlaku terkait dengan operasional koperasi. Mereka harus memahami peraturan, regulasi, dan kebijakan yang mengatur koperasi dan memastikan agar kegiatan koperasi berada dalam batas hukum yang ditetapkan.

3.4.3 Simbolik

3.4.3.1 Identitas

Identitas ini juga dapat berkembang seiring waktu dan perubahan lingkungan atau prioritas yang ada. Untuk informasi lebih lanjut tentang identitas dinas koperasi Kota Medan, disarankan untuk merujuk pada kebijakan, dokumen resmi, dan komunikasi publik yang dikeluarkan oleh dinas koperasi tersebut.

3.4.3.2 Simbolik

Simbolik dinas koperasi dapat bervariasi tergantung pada kebijakan dan preferensi dinas koperasi tersebut. Untuk informasi lebih lanjut mengenai simbolik dinas koperasi Kota Medan.

3.4.3.3 Status

Penting untuk dicatat bahwa penjelasan di atas merupakan gambaran umum tentang bagaimana status dinas koperasi dapat dikonseptualisasikan. Untuk informasi lebih lanjut tentang status dinas koperasi Kota Medan, disarankan untuk merujuk pada peraturan dan perundang-undangan yang mengatur dinas koperasi, serta sumber-sumber resmi yang berkaitan dengan status dan peran dinas tersebut.

IV. KESIMPULAN

Hasil penelitian ini adalah Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan dapat dilihat dari hasil wawancara dan data yang didapat di lapangan. Kebijakan Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan dengan strategi dan program-program yang dimiliki Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan serta hasil dari berbagai kerjasama berbagai sektor yang dapat mendukung program dan strategi peran Dinas Koperasi dan UMKM dalam meningkatkan perekonomian masyarakat di Kota Medan. Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan perlu meningkatkan akses pembiayaan untuk dapat membantu pemilik usaha untuk mengakses pembiayaan melalui program pinjaman dengan bunga rendah atau bantuan keuangan lainnya. Meningkatkan pembiayaan dan pemberdayaan Koperasi dan UMKM melalui kerja sama antar setiap sektor guna meningkatkan produktifitas pelaku usaha. Kemudian Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan diharapkan mampu menentukan arah kebijakan yang tepat untuk mendukung pertumbuhan dan pengembangan Koperasi dan UMKM. serta hasil evaluasi terhadap program sebelumnya.

Keterbatasan Penelitian. Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan.

Arah Masa Depan Penelitian (*future work*). Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Peran Dinas Koperasi dan UMKM Dalam Meningkatkan Perekonomian Masyarakat di Kota Medan Provinsi Sumatera Utara, untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan beserta jajarannya, yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.

VI. DAFTAR PUSTAKA

- Soejono Soekanto. (2012). *Sosiologi Suatu Pengantar*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Purba, U. A. M. (2013). *Peranan Dinas Tenaga Kerja dan Koperasi Kabupaten Serdang Bedagai dalam Memberdayakan Usaha Mikro Kecil Menengah* (Doctoral dissertation, Universitas Sumatera Utara).

- Wahyuningsih, S. (2009). *Peranan UKM Dalam Perekonomian Indonesia*. Mediagro, 5(1).
- Nur, D. S. (2017). *Peran dinas koperasi dan UKM dalam pemberdayaan usaha mikro, kecil dan menengah (UMKM) di Kota Samarinda*. Jurnal Administrasi Publik, 5(2), 5844.
- Skripsi Immanuel, Samantha. (2018) *Peran Pemberdayaan Dinas Koperasi Dan UMKM Dalam Pengembangan UMKM Kota Medan* (Studi Pada Dinas Koperasi Dan UMKM Kota Medan). Medan: Universitas Sumatera Utara.
- <https://medankota.bps.go.id/> Badan Pusat Statistik Kota Medan, diakses pada 4 Januari 2023.
- [10 Permasalahan UMKM beserta Solusinya - StaffAny](#) , diakses pada 4 Januari 2023.
- Renstra Dinas Koperasi dan UMKM Kota Medan 2021-2026.

